

Dr. Agussalim Andi Gadjong, S.H.



PEMERINTAHAN DAERAH

Kajian Politik dan Hukum

Analisis Perundang-undangan
Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah
Semenjak Tahun 1945 Sampai dengan 2004



PEMERINTAHAN DAERAH

Kajian Politik dan Hukum

Suatu negara kesatuan, baru bisa dikatakan telah berwujud suatu pemerintahan yang demokratis tatkala kekuasaan dan kewenangan pemerintah daerah dijalankan secara efektif dalam pemberdayaan kemaslahatan rakyatnya.

Pelaksanaan pemerintahan di daerah dilaksanakan dengan meliputi kewenangan *zelfwetgeving* dan *zelfbestuur*, yang dengan itu mengakomodasi kepentingan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan secara demokratis.

Di dalam buku ini, penulis memaparkan tentang landasan teori otonomi daerah serta pelaksanaan pemerintahan daerah di negara kesatuan, konsep legalitas dan kewenangan (atribusi, delegasi, mandat) pemerintah daerah, konsep bentuk dan susunan negara, konsep pembagian kekuasaan (*general competence*, *ultravires*, campuran) dan konsep negara hukum, serta konsep negara demokrasi. Analisis dimulai semenjak kemerdekaan RI sampai dengan pada masa Reformasi.

Komprehensivitas kajian dalam buku ini ditunjukkan dengan analisis dan perbandingan dari setiap peraturan dan perundangan yang pernah ada dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Totalitas penyusunan buku ini akan Anda temukan dengan melihat kelengkapan bahan kajian dan referensi yang disajikan penulis.

www.yudhistira-gi.co.id



Penerbit

GHALIA INDONESIA



Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	xiii
Bagian I: Pendahuluan	1
Bagian II: Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan dalam Konsep Negara Hukum dan Demokrasi	20
A. Istilah serta Konsep Negara Hukum dan Demokrasi	20
B. Konsep dan Teori Pemisahan Kekuasaan Negara	37
C. Konsep dan Teori Pembagian Kekuasaan Negara	46
D. Sumber dan Legitimasi Kekuasaan Negara	55
Bagian III: Konsepsi Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan ...	62
A. Susunan Negara, Bentuk Negara, dan Bentuk Pemerintahan	62
B. Kewenangan Daerah di Negara Kesatuan dan Negara Federal	68
C. Landasan Asas Pelaksanaan Pemerintahan Daerah	77
1. Penerapan Asas Desentralisasi	79
2. Penerapan Asas Dekonsentrasi	89
3. Penerapan Asas Tugas Pembantuan	91
D. Pelimpahan dan Penyerahan Kewenangan	93
1. Teori Pelimpahan Kewenangan dengan Atribus	101
2. Teori Pelimpahan Kewenangan dengan Delegasi	104
3. Teori Pelimpahan Kewenangan dengan Mandat	106
E. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom	108
Bagian IV: Kontek Empiris dan Landasan Hukum Pelaksanaan Pemerintahan Daerah	114
A. Sejarah Perkembangan Sebelum Kemerdekaan	114
B. Dinamika dalam Penyusunan dan Perumusan Hukum Dasar Negara	119
C. Dinamika dalam Pergantian (Perubahan) Hukum Dasar Negara	125
1. Masa Pemberlakuan UUD RI Tahun 1945 (Periode I: Proklamasi NKRI)	125
2. Masa Pemberlakuan Konstitusi RIS Tahun 1949	130

3. Masa Pemberlakuan UUD Sementara RI Tahun 1950	133
4. Masa Pemberlakuan UUD RI Tahun 1945 (Periode II: Dekrit Presiden RI)	137
5. Masa Pemberlakuan UUD NRI Tahun 1945 (Periode III: Amandemen UUD 1945).....	140
D. Landasan Hukum Pelaksanaan Pemerintahan Daerah.....	142
1. Pemberlakuan UU No. 1 Tahun 1945.....	142
2. Pemberlakuan UU No. 22 Tahun 1948.....	144
3. Pemberlakuan UU NIT No. 44 Tahun 1950	146
4. Pemberlakuan UU No. 1 Tahun 1957	147
5. Pemberlakuan Penpres No. 6 Tahun 1959	149
6. Pemberlakuan UU No. 18 Tahun 1965.....	152
7. Pemberlakuan UU No. 5 Tahun 1974.....	158
8. Pemberlakuan UU No. 22 Tahun 1999	161
9. Pemberlakuan UU No. 32 Tahun 2004.....	167
Bagian V: Dinamika Perkembangan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah di Indonesia	169
A. Mekanisme Kebijakan Pendelegasian Kewenangan.....	169
1. Mekanisme Pendelegasian dalam Kaidah Konstitusi/UUD	169
2. Mekanisme Pendelegasian dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah	173
3. Mekanisme Pendelegasian dalam Kaidah Konsep Atribusi, Delegasi, dan Mandat	181
4. Mekanisme Pendelegasian dalam Kaidah Pola <i>General Competence</i> , <i>Ultravires</i> , dan Campuran.....	187
B. Jenis, Besaran, dan Bentuk Penyerahan Kewenangan.....	196
C. Pembagian, Pembentukan, Tingkatan, dan Susunan Pemerintahan Daerah	223
D. Mekanisme Pengawasan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah	260
E. Pemilihan Kepala Daerah dan DPRD.....	266
Bagian VI: Pergeseran Makna dan Politik Hukum Pelaksanaan Pemerintahan Daerah	269
A. Pergeseran Makna Pelaksanaan Pemerintahan Daerah.....	269
1. Pergeseran Makna dalam Kaidah Konstitusi/UUD	269
2. Pergeseran Makna Jenis dan Besaran Kewenangan Pemerintahan Daerah	274

3. Pergeseran Makna Ka tahan Daerah	
4. Pergeseran Makna Kaic Susunan Pemerintahan	
5. Pergeseran Makna Pen mokratisasi Pemerinta	
B. Politik Hukum Pelaksana	
1. Politik Hukum dalam	
2. Politik Hukum dalam P sunan Pemerintahan D	
3. Politik Hukum dalam P Daerah	

Bagian VII: Penutup.....

Daftar Pustaka

Tentang Penulis

3. Masa Pemberlakuan UUD Sementara RI Tahun 1950	133
4. Masa Pemberlakuan UUD RI Tahun 1945 (Periode II: Dekrit Presiden RI)	137
5. Masa Pemberlakuan UUD NRI Tahun 1945 (Periode III: Amandemen UUD 1945).....	140
D. Landasan Hukum Pelaksanaan Pemerintahan Daerah	142
1. Pemberlakuan UU No. 1 Tahun 1945	142
2. Pemberlakuan UU No. 22 Tahun 1948.....	144
3. Pemberlakuan UU NIT No. 44 Tahun 1950	146
4. Pemberlakuan UU No. 1 Tahun 1957	147
5. Pemberlakuan Penpres No. 6 Tahun 1959	149
6. Pemberlakuan UU No. 18 Tahun 1965.....	152
7. Pemberlakuan UU No. 5 Tahun 1974.....	158
8. Pemberlakuan UU No. 22 Tahun 1999	161
9. Pemberlakuan UU No. 32 Tahun 2004.....	167

Bagian V: Dinamika Perkembangan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah di Indonesia 169

A. Mekanisme Kebijakan Pendelegasian Kewenangan.....	169
1. Mekanisme Pendelegasian dalam Kaidah Konstitusi/UUD	169
2. Mekanisme Pendelegasian dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah	173
3. Mekanisme Pendelegasian dalam Kaidah Konsep Atribusi, Delegasi, dan Mandat	181
4. Mekanisme Pendelegasian dalam Kaidah Pola <i>General Competence</i> , <i>Ultravires</i> , dan Campuran.....	187
B. Jenis, Besaran, dan Bentuk Penyerahan Kewenangan.....	196
C. Pembagian, Pembentukan, Tingkatan, dan Susunan Pemerintahan Daerah	223
D. Mekanisme Pengawasan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah	260
E. Pemilihan Kepala Daerah dan DPRD	266

Bagian VI: Pergeseran Makna dan Politik Hukum Pelaksanaan Pemerintahan Daerah 269

A. Pergeseran Makna Pelaksanaan Pemerintahan Daerah.....	269
1. Pergeseran Makna dalam Kaidah Konstitusi/UUD	269
2. Pergeseran Makna Jenis dan Besaran Kewenangan Pemerintahan Daerah	274

3. Pergeseran Makna Kaidah Landasan Asas UU Pemerintahan Daerah	280
4. Pergeseran Makna Kaidah Pembagian, Pembentukan, dan Susunan Pemerintahan Daerah	282
5. Pergeseran Makna Penguatan Kedulatan Rakyat dan Demokratisasi Pemerintahan.....	284
B. Politik Hukum Pelaksanaan Pemerintahan Daerah	291
1. Politik Hukum dalam Delegasi Kewenangan	291
2. Politik Hukum dalam Pembagian, Pembentukan, dan Susunan Pemerintahan Daerah	297
3. Politik Hukum dalam Pemilihan dan Kedudukan Kepala Daerah	300
Bagian VII: Penutup.....	302
Daftar Pustaka	308
Tentang Penulis	323